

SIOLA DI MAMUJU
(STUDI KASUS KEMITRAAN YAYASAN KARAMPUANG DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MAMUJU)

Disusun dan diusulkan Oleh

MUTHMAINNAH.R

Nomor Stambuk : 105640205314



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018/2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SIOLA di Mamuju (Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat).

Nama Mahasiswa : Muthmainnah.R

Nomor Stambuk : 105640205314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 25 bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) ()
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd ()
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si ()
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muthmainnah.R

Nomor Stambuk : 105640205314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 4 Juni 2018

Yang Menyatakan,

Muthmainnah.R

ABSTRAK

MUTHMAINNAH.R 2018. SIOLA di Mamuju Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju (Dibimbing oleh Ansyari Mone dan Handam).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui SIOLA di Mamuju dalam Proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini ada 10 orang yaitu Sekertaris Pemerintah Daerah Mamuju, Ketua Yayasan Karampuang Mamuju, Staf Yayasan Karampuang Mamuju, Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat Mamuju.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIOLA di Mamuju dalam Proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Proses Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mamuju dilihat dari segi pemberian kewenangan, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi dan bebas untuk mnyalurkan pendapat, dan dalam segi pengembangan kapasitas, Yayasan Karampuang Mamuju memberikan arahan atau sosialisasi tentang upaya pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat agar kiranya dapat menambah potensi masyarakat dalam segi keterampilan dan dapat menambah pengetahuan baik individu maupun kelompok.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, Sholawat serta salam dan taslim semoga senantiasanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayahnya Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “SIOLA di Mamuju (Studi Kasus Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran, peneliti menyampaikan bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan terimakasih secara khusus peneliti ucapkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kedua Orang Tua Ayah Drs. Ruslan dan Ibu Jamaliah, A.Ma dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini bisa peneliti selesaikan.
5. Kak Nur Khaerah S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademik yang senantiasa mendampingi dan memberikan arahan sampai saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu penguji yang telah menguji peneliti sehingga skripsi yang peneliti miliki menjadi lebih sempurna.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
8. Seluruh staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti.
9. Pihak Yayasan Karampuang Mamuju dan seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
10. Para informan dalam penelitian ini, terima kasih atas partisipasinya dalam penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat peneliti Ika Triwahyuni S.IP, Surya Insani S.IP, Husnul Khatimah S.IP, Munira, Hijrawaty, Yuliarti, yang telah memberikan motivasi dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi peneliti.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2014 khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan kelas E.
13. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan doanya.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak, peneliti hanya mampu untuk bermohon dan penuh harap kepada Allah SWT, karena hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti. Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 November 2018

Muthmainnah. R

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	8
B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	11
C. Konsep Partisipasi Masyarakat	16
D. Kerangka Pikir	19
E. Fokus Penelitian	20
F. Deskriptif Fokus Penelitian	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Informan Penelitian	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	25
G. Keabsahan Data	26

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Gowa	29
B. Profil Yayasan Karampuang Mamuju	41
C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	66
-----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap peneliti, **MUTHMAINNAH.R** Lahir di Mamuju Sulawesi Barat Pada Tanggal 29 Mei 1996 Anak Pertama dari dua Bersaudara pasangan dari DRS.Ruslan dan Jamaliah, A,Ma. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SD Negeri 1 Mamuju Kecamatan Mamuju pada tahun 2008. Pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mamuju dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Mamuju pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.

SIOLA DI MAMUJU
(STUDI KASUS KEMITRAAN YAYASAN KARAMPUANG DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MAMUJU)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MUTHMAINNAH.R

Nomor Stambuk : 10564 02053 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018/2019

Artikel Disetujui Jurnal Digunakan Untuk Ujian Skripsi dan Diserahkan Kembali ke
Pengelola Untuk di Upload Ke Jurnal Online.

**Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju Dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di
Kabupaten Mamuju**

Muthmainnah.R, Ansyari Mone, Handam

1056402053 14

Universitas Muhammadiyah Makassar

Muthmainnah650@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Informan dalam penelitian ini ada 9 orang yaitu Ketua Yayasan Karampuang Mamuju, Staf Yayasan Karampuang Mamuju, dan Tokoh Masyarakat Mamuju. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mamuju melalui Proses Pemberdayaan Sosial Masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju dalam hal pemberdayaan bisa dikatakan sudah berjalan baik dari segi pemberian kewenangan, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi dan bebas untuk mnyalurkan pendapat, dalam segi pengembangan kapasitas, yayasan karampuang mamuju memberikan arahan atau sosialisasi tentang upaya pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat agar kiranya dapat menambah potensi masyarakat dalam segi keterampilan dan dapat menumbuh-kembangkan perekonomiannya, Serta memberikan pencegahan pada pernikahan anak usia dini.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT

This article discusses the participation of the Karampuang Mamuju Foundation in Community Social Empowerment in Mamuju District. This type of research uses qualitative research with a qualitative descriptive type that is a method that describes or analyzes a research result but is not used to make broader conclusions. The informants in this study were 9 people, namely the Chairperson of the Mamamp Karampuang Foundation, the Karampuang Mamuju Foundation Staff, and the Mamuju Community Leader. Data collection techniques used by researchers were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the results of the study show that the Participation Process of the Karampuang Mamuju Foundation in Community Social Empowerment in Mamuju District through the Karampuang Mamuju Foundation's Community Empowerment Process in terms of empowerment can be said to have run well in terms of giving authority, where people are given the freedom to participate and free to channel opinions, in terms of capacity development, the karampuang mamasis foundation provides direction or outreach on capacity building efforts in community empowerment so that it can add to the potential of the community in terms of skills and can grow their economy, and provide prevention for early childhood marriages.

Keywords: Community Empowerment

A. Pendahuluan

pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2013).

Hal yang serupa disampaikan oleh (widjaja, 2011) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasiasn wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Lalu menurut (Soemantri, 2011) Mengatakan pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hal yang senada disampaikan oleh (Adisasmita, 2013) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS mengartikan organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk

oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kabupaten Mamuju memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Yayasan Karampuang Mamuju. Berbicara tentang peran LSM dalam pemberdayaan sosial masyarakat, di Provinsi Sulawesi Barat terdapat sebuah LSM yang hingga kini tetap eksis melakukan pemberdayaan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan hingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. LSM tersebut merupakan wadah penyaluran aspirasi dalam memenuhi tuntutan pembangunan di segala bidang untuk kepentingan bersama di Provinsi Sulawesi Barat.

Berbagai penelitian tentang LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) diantaranya Silmi (2017) terkait Peran LSM Provisi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh LSM Provisi membuat konsep program pemberdayaan di bidang perikanan dan pertanian yang ditawarkan pada masyarakat dan menyerahkan kepada masyarakat mengenai program mana yang mereka inginkan. Adapun dalam penelitian Mahardika (2012) dengan judul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto) dimana Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu lemah yang menyebabkan kurangnya jaminan sosial bagi korban kejahatan membuatnya menjadi sasaran kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh kaum pria. Sedangkan dalam penelitian Arianto (2017) dengan judul NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia bahwa dalam budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, Namun perubahan itu terjadi di daerah

perkotaan dan pedesaan yang telah maju, sementara di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan yang berarti, hal ini disebabkan kurangnya pendidikan politik dan informasi mengenai perpolitikan yang berkembang di republik ini.

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mamuju.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dilakukan di Yayasan Karampuang Kabupaten Mamuju. Topik yang diteliti adalah Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mamuju. Dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 9 orang informan yaitu Ketua Yayasan Karampuang Mamuju, Staf Yayasan Karampuang Mamuju, dan Tokoh Masyarakat Mamuju.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut (Sumpeno, 2011) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Hal yang serupa disampaikan oleh Ali (dalam Sukmawati 2012) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Adapun menurut Stewart (dalam awang, 2010) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan.

Lalu secara sederhana (Rahayu, 2008) mengatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

Lalu menurut (Suhendra, 2006) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Adapun menurut Wuradji (dalam Aziz Muslim, 2009) menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS mengartikan organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Adapun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut (Mahardika, 2012) Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Hal senada yang disampaikan oleh (Laksmi, 2015) bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah merupakan usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistis, edukatif, agama dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan masa yang akan datang.

Oleh karena itu dengan hadirnya konsep Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator dalam menilai Pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mamuju yakni menggunakan konsep proses Pemberdayaan Sosial Masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju.

1. Pemberian kewenangan

Pemberian kewenangan dapat menimbulkan suatu masalah yang timbul diakibatkan karena masih kurangnya pemberian kewenangan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan maka solusi yang akan ditawarkan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat termasuk lapisan bawah pada level komunitas dalam pengelolaan bangunan. kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Adapun hasil wawancara Ketua Yayasan Karampuang Mamuju dan Staf mengatakan bahwa dalam pemberian kewenangan kepada masyarakat kami mensosialisasikan kegiatan yang kami lakukan setelah itu masyarakat mampu

berproses tanpa didampingi oleh pihak yayasan karampuang Salah satu kegiatan yang sering dilakukan Yayasan Karampuang yaitu membuat pelatihan seperti training of trainert seperti dalam program pencegahan pernikahan anak usia dini. Dalam pemberian kewenangan kami hanya mendorong masyarakat agar mereka tahu dan paham mengenai setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Contoh salah satu kegiatan yang dilakukan seperti dana desa itu digunakan tidak hanya untuk pembangunan sekolah tapi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan untuk bumdes tapi kadang masyarakat tidak mau tahu tentang itu jadi kami mendorong pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham terkait dana desa.

2. Pengembangan Kapasitas

Proses pengembangan kapasitas diharapkan masyarakat semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Dengan demikian proses ini membutuhkan peran dari luar sebagai perubahan lingkungan untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat. pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Ketua Yayasan Karampuang Mamuju dan masyarakat mengatakan bahwa Yayasan karampuang selalu membuat pelatihan seperti training of trainert seperti dalam program pencegahan pernikahan anak usia dini ini ada yang berbasis masyarakat jadi ada juga yang kami latih fasilitator desa kemudian di level kecamatan kita juga latih kalau di program pendidikan ada perencanaan pendidikan berbasis desa dilatih juga aparat

desanya untuk bagaimana mereka menyusun program kerja. pengembangan kapasitas memberikan pendampingan kepada masyarakat misalnya kalau ada kasus-kasus tertentu yang terjadi mereka biasa memberikan pendampingan dan juga berperan sebagai edukasi memberikan pencerahan kepada masyarakat menyampaikan berbagai macam program disampaikan kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada bisa sampai ke masyarakat sehingga berpeluang juga untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah ekonomi pengembangan usaha berkaitan juga dengan kesehatan dan sebagainya

D. Kesimpulan

Berdasarkan Proses Partisipasi Yayasan Karampuang Mamuju dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Kabupaten Mamuju melalui Proses Pemberdayaan Sosial Masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju dalam hal pemberdayaan bisa dikatakan sudah berjalan baik dari segi pemberian kewenangan, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi dan bebas untuk mnyalurkan pendapat, dalam segi pengembangan kapasitas, yayasan karampuang mamuju memberikan arahan atau sosialisasi tentang upaya pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat agar kiranya dapat menambah potensi masyarakat dalam segi keterampilan dan dapat menumbuh-kembangkan perekonomiannya, Serta memberikan pencegahan pada pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aziz Muslim. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Teras. Yogyakarta.
- LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10
- Mahardika, Friska. 2012. *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Purwokerto.
- Mardikanto, Totok dk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Rahayu, Budiana. 2008. *Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, MG, Semarang.
- Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peran Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmawati. 2012. *Skripsi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) dalam Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kelurahan Tonyamang Kabupaten Pinrang*. STIA LAN Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Di akses pada 16 April 2018 http://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2015/08/UU_NO_17_2013.pdf
- Wahjudin,Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Reinforcement Action and Development*. Banda Aceh.
- Widjaja Haw. 2011. *Otonomi Daeran dan Daerah Otonom*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : SIOLA di Mamuju (Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat).

Nama Mahasiswa : Muthmainnah.R

Nomor Stambuk : 105640205314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Pembimbing II

Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Jumat tanggal 25 bulan Januari Tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau yang biasa dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah *Non Government Organization* (NGO) yang merupakan salah satu pilar *civil society* dimana tugas atau komitmen *civil society* adalah bagaimana pemberdayaan sosial masyarakat untuk masyarakat yang tidak dibawah naungan Pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut dengan LSM merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang secara sukarela ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Pada era otonomi daerah, Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan membina lembaga swadaya masyarakat di daerah. Pemerintah daerah juga dapat membuat peraturan daerah untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatu tentang LSM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ORMAS mengartikan organisasi kemasyarakatan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Mahardika, 2012:13). Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat dalam dunia pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberantasan buta aksara dan Kesehatan.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2013: 100). Dengan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang maju dalam organisasi, LSM yayasan karampuang menjadi salah satu bentuk partisipasi, sehingga dalam memberdayakan masyarakat mereka memiliki peran dalam membentuk dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil.

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Termasuk perannya dalam membantu melindungi hak-hak masyarakat yang tidak terlindungi atau mendapat perlindungan yang tidak maksimal dari pemerintah. Hak-hak masyarakat sangat dekat kaitannya dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa peraturan perundang-

undangan yang memiliki kekuatan hukum pasti. Namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperjuangkan haknya, maka LSM disini dapat berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk membantu memperjuangkan haknya (Mahardika, 2012:15).

Berbicara tentang peran LSM dalam pemberdayaan sosial masyarakat, di Provinsi Sulawesi Barat terdapat sebuah LSM yang hingga kini tetap eksis melakukan pemberdayaan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan hingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Yayasan Karampuang. LSM tersebut merupakan wadah penyaluran aspirasi dalam memenuhi tuntutan pembangunan di segala bidang untuk kepentingan bersama di Provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah Daerah Mamuju memberikan semangat dan motivasi serta tegas dalam mendorong keterlibatan aktif masing-masing SKPD untuk mensukseskan program SIOLA. Sehingga, Gugus SIOLA yang baru diinisiasi saat Lokakarya mengenai PAUD HI bulan Desember 2011 telah menjadi model percontohan Pengembangan anak Usia Dini Holistik Integratif seIndonesia.

SIOLA merupakan nama yang diambil dari bahasa Mandar yang diberikan untuk pelayanan terpadu Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Mamuju. Siola artinya bersama-sama – bersatu dalam memberikan pelayanan terhadap anak berusia 0-6 tahun, para Ibu dan keluarganya. Siola dilaksanakan secara holistik, integratif dan partisipatif, dengan memperluas kesempatan bagi setiap anak usia emas untuk memperoleh dan menikmati pendidikan usia dini. Pemerintah Daerah

Mamuju telah berkomitmen untuk mendorong dan mendukung pembinaan anak usia dini dalam bentuk program dan kegiatan, serta mendorong keterlibatan keluarga untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan anak.

Menanggapi pernyataan di atas, terlihat komitmen dan partisipasi yang tinggi dari LSM Yayasan Karampuang untuk membangun daerah dan memberdayakan masyarakat di segala link. Oleh itu, berdasarkan pemaparan informasi pada paragraf sebelumnya menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian tentang **“SIOLA di Mamuju Studi Kasus Kemitraan Yayasan Karampuang Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju”**.

Adapun penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, seperti yang dilakukan Silmi (2017) terkait Peran LSM Provisi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh LSM Provisi membuat konsep program pemberdayaan di bidang perikanan dan pertanian yang ditawarkan pada masyarakat dan menyerahkan kepada masyarakat mengenai program mana yang mereka inginkan. Masyarakat dibagi menjadi 2 kelompok program berdasarkan pilihan masing-masing yakni pada kelompok perikanan lele yang mencakup sebagian besar warga dan sebagian kecil kelompok pertanian hidropolik. Adapun aktualisasi PLA (*Participatory Learning and Action*) sebagai metode

pemberdayaan masyarakat di Lubuk Bintialo. Salah satu kekuatan dari suatu pemberdayaan masyarakat ialah partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Sedangkan dalam penelitian Mahardika (2012) dengan judul Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto) dimana Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu lemah yang menyebabkan kurangnya jaminan sosial bagi korban kejahatan membuatnya menjadi sasaran kejahatan yang kebanyakan dilakukan oleh kaum pria.

Hal yang membedakan dari penelitian terdahulu yang ada di atas yaitu dimana dalam lembaga swadaya masyarakat program LSM Yayasan Karampuang konsentrasi pemberdayaannya tidak terbatas hanya pada pemberdayaan tertentu saja, tetapi juga fokus pada pemberdayaan sosialnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Bagaimana SIOLA di Mamuju dalam Proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui SIOLA di Mamuju dalam proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih komprehensif tentang SIOLA di Mamuju dalam Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju yang belum terungkap dalam penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa–mahasiswa yang berasal dari Mamuju khususnya tentang berbagai konsep atau teori yang memberikan informasi dan data dalam penelitian tentang SIOLA di Mamuju Dalam Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju secara berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman atau bahan evaluasi dalam mengembangkan SIOLA di Mamuju Dalam Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju.
- b. Sebagai rujukan atau pedoman bagi rekan mahasiswa atau peneliti yang ingin melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Terdapat banyak para ahli yang mendefinisikan tentang Lembaga swadaya masyarakat. Menurut Mahardika (2012:13) Lembaga swadaya masyarakat secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Menurut Arianto (2017:5) LSM memainkan tiga jenis peranan yang sangat penting, yaitu :

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang sangat esensial dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan pengaruh politik yang luas, melalui jaringan kerja sama, baik di dalam negeri maupun dengan lembaga-lembaga internasional.
3. Ikut mengambil bagian dalam penentuan arah dan agenda pembangunan.

Hal senada yang disampaikan oleh Laksmi (2015:6) bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah merupakan usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistik, edukatif, agama dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan

masa yang akan datang. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Adapun Tujuan LSM menurut Husodo (2015:7) yaitu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari masyarakat yang dilayani, tetapi mereka mempunyai motivasi kerja yang berbeda dari zaman ke zaman LSM itu ada. Karena masyarakat atau organisasi Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga yang lebih besar lagi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Pola Kerja LSM Sesuai dengan fungsi LSM dalam UU No. 8 Tahun 1985 maka secara garis besar ada 2 (dua) pola dan pendekatan yang dapat dilakukan LSM dalam merealisasikan visi dan misinya menurut Yusdiyanto (2012:8) yaitu :

1. Advokasi Pola ini biasanya dilakukan oleh LSM garis keras yang lebih memfokuskan kegiatannya pada perubahan kebijakan pemerintah. LSM bidang advokasi lebih banyak berkiprah dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik. Misalnya LSM memantau transparansi penggunaan APBD dan Penegakan Hukum.
2. Intervensi LSM intervensi lebih banyak memfokuskan dalam kegiatan praktis. Misalnya LSM yang bergerak dalam hal pengembangan ekonomi, teknologi tepat guna dan sebagainya.

Menurut Yusdiyanto (2012:03) LSM dapat digolongkan menjadi tiga tipologi, yaitu:

1. Tipe Konformisme adalah aktivis LSM melakukan pekerjaan dengan didasarkan pada paradigma karitatif, dengan motivasi menolong rakyat yang didasarkan pada niat baik untuk membantu yang membutuhkan.
2. Tipe Reformis adalah pemikiran yang didasarkan pada ideology developmentalisme dan modernisasi yang akhirnya masyarakat miskin karena mereka tidak berpendidikan dan tidak memiliki modal. Karena itu kemudian LSM memfasilitasi melalui pelatihan-pelatihan dan memberi bantuan modal untuk berusaha.
3. Tipe Transformatif adalah LSM berusaha mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat dan membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tipe ini lebih pada melihat dan mencari struktur dan superstruktur yang

memungkinkan bagi rakyat untuk mengontrol perubahan social menuju jalan demokratis dalam pergeseran social, hokum, ekonomi dan politik.

B. Konsep Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang Pemberdayaan sosial masyarakat. Seperti Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Hal yang serupa disampaikan oleh widjaja (2011:77) Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Lalu secara sederhana Soemantri (2010:74) menyimpulkan Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu hal yang senada juga disampaikan oleh

(Adisasmita, 2011:131) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun menurut Stewart (dalam awang, 2010:46) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada pihak lain atau memberi kemampuan dan keberdayaan. Lalu secara sederhana Rahayu (2008:46) mengatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Prijono dan Pranarka (dalam awang, 2010:47) menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok. Lalu menurut Soemantri (2011:3) Mengatakan pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mardikanto (2013:100) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Lalu menurut Adisasmita (2013:78) pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Adapun menurut Wuradji (dalam Aziz Muslim 2009:3) menyebutkan pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Lalu secara sederhana menurut Eddy Papilaya (dalam Zubaedi 2007:42) yang

mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Menurut Suharto (2005:9) mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas kehidupannya).

Sebagaimana menurut Ali (dalam Sukmawati 2012:9) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan

mental maupun fisik. Lalu menurut Suhendra (2006:8) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi.

Menurut Soetomo (2015:12) menjelaskan bahwa terdapat dua indikator dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian kewenangan

Masalah yang timbul diakibatkan karena kurangnya pemberian kewenangan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan maka solusi yang ditawarkan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat termasuk lapisan bawah pada level komunitas dalam pengelolaan bangunan.

2. Pengembangan kapasitas

Proses pengembangan kapasitas diharapkan masyarakat semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Dengan demikian proses ini membutuhkan peran dari luar sebagai perubahan lingkungan untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat.

Adapun menurut Jim Ife (dalam Kadarisman 2012:11) Pemberdayaan adalah sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi didalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka. Lalu secara sederhana menurut

Sumaryadi (2005:12) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah-langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

C. Konsep Partisipasi Masyarakat

Terdapat banyak ahli dan pakar yang telah mengemukakan pendapatnya tentang definisi partisipasi masyarakat. Seperti Yusdiyanto (2012:4) yang mendefinisikan Partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan, tidak hanya sebagai pelaksanaan dari asas keterbukaan yang melandasi sebuah Negara demokratis, tetapi juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pemerintahan.

Hal yang senada seperti yang disampaikan Zuhro dkk (2010:51) dalam penelitiannya bahwa Partisipasi berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk memberi masukan dalam pembentukan Perda, tanpa secara bersamaan mewajibkan Pemda dan DPRD mempermudah masukan tersebut sampai pada mereka. Lalu secara sederhana Khairul (2006:43) menyimpulkan Partisipasi bisa bersifat transitif atau intrasitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral, juga bisa bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif maupun spontan.

Adapun menurut Isbandi (2007:27) yang mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Lalu secara sederhana menurut Henryk (2013:613) Konsep partisipasi mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi dimana kemampuan dan pendidikan mempengaruhi sikap dan cara berperilaku seseorang.

Menurut Holil (dalam Isbandi, 2007:21) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
3. Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Syahyuti (dalam Mappamiring 2006:38) mengemukakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Lalu hal yang senada juga disampaikan oleh H.A.R. Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Menurut Verhangen (dalam Setiawan 2015:9) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan, kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat, sehubungan dengan hal itu, berbagai kegiatan partisipasi akan mencakup:

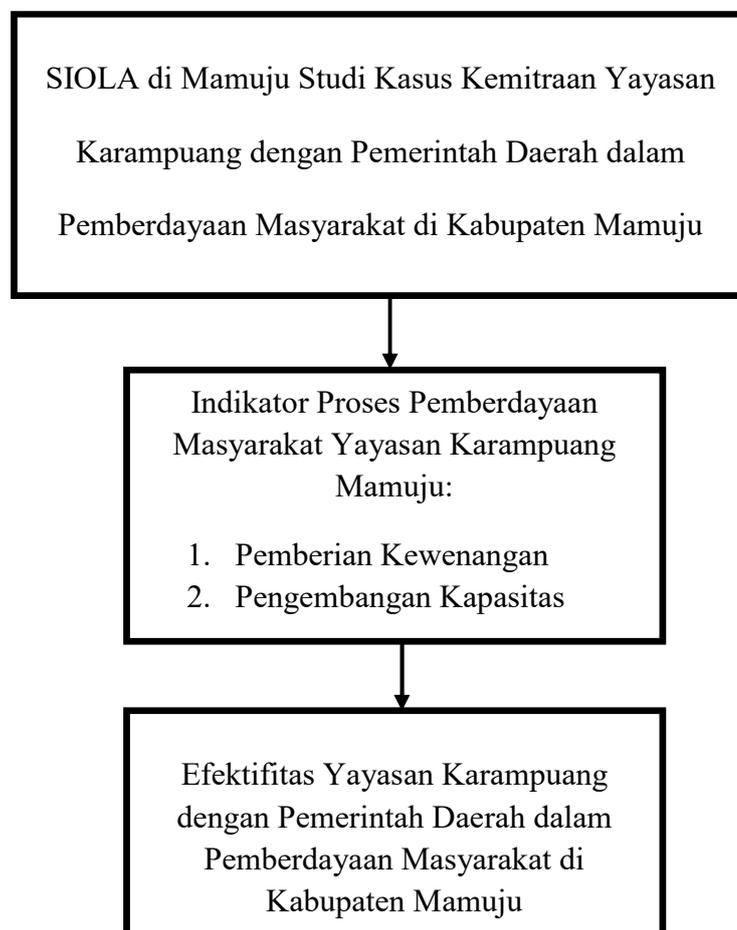
1. Menjadi anggota kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

Adapun menurut Herbert Miclosky (dalam Setiadi dan Kolip 2013:137) Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui

dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Lalu hal yang senada juga disampaikan oleh Sedermayanti (2012:44) Partisipasi merupakan setiap orang atau warga negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

D. Kerangka Pikir

Dalam suatu Yayasan Karampuang mempunyai beberapa bentuk Proses Pemberdayaan Masyarakat. Lebih jelasnya dapat di gambarkan dalam kerangka fikir berikut:



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersangkutan dari rumusan masalah adalah *“SIOLA di Mamuju Studi Kasus Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju”*.

Fokus penelitian ini terdiri terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu:

“SIOLA di Mamuju dalam Proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju”.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pemberian Kewenangan

Pemberian kewenangan adalah suatu masalah yang timbul diakibatkan karena masih kurangnya pemberian kewenangan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan maka solusi yang ditawarkan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat termasuk lapisan bawah pada level komunitas dalam pengelolaan bangunan.

2. Pengembangan Kapasitas

Proses pengembangan kapasitas diharapkan masyarakat semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Dengan demikian proses ini membutuhkan peran dari luar sebagai perubahan lingkungan untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan agustus-september tahun 2018. Penelitian ini berlokasi di Yayasan Karampuang Mamuju, Jln. Ir. H. Djuanda, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terkait langsung dengan SIOLA di Mamuju Studi Kasus Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai proses dalam melihat pemberdayaan sosisal masyarakat di kabupaten Mamuju serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang ditentukan oleh peneliti yang akan memberikan informasi terkait obyek yang akan diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, atau dikenal dengan teknik penentuan sampel bertujuan, yaitu penentuan informan dengan mencari tahu siapa tokoh yang memiliki pengetahuan yang mapan terkait masalah yang diteliti. Teknik penentuan informan dalam hal ini ditempuh dengan mencari pihak yang terlibat langsung dengan Yayasan Karampuang Mamuju dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Seperti itulah proses penentuan informan hingga mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

**Tabel Informan Penelitian Kemitraan Yayasan Karampuang
dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat :**

NO.	Jabatan/ Status	Nama	Inisial
1.	Sekretaris Daerah Mamuju	H. Suaib, S.Sos	HS
2.	Ketua Yayasan Karampuang Mamuju	Ijah Syahrani	IS
3.	Staf Yayasan Karampuang Mamuju	1. Ahmad Martono 2. Prilly Bella 3. Muhammad Aditya	AM PB MA
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Muh. Marwan	MM
5.	Masyarakat	1. Muh. Irwan 2. Kasman Hamal 3. Namru Asdar 4. Sahari Bulan	MI KH NA SB
Jumlah			10 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut sugiyono (2016:137) sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mamuju.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari Kabupaten Mamuju.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam *website*.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk

menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat komponen pokok.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Radu, 2015:45) terdapat tiga komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart*, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion drawing /Verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Oleh Karena itu peneliti melakukan keabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya.

2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu peneliti akan memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

3. Triangulasi

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi Teknik yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara

atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak
akuratannya.

- c. Triangulasi Waktu yaitu waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Yayasan Karampuang Mamuju di Kabupaten Mamuju menjadi tempat atau lokasi penelitian.

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Kabupaten Mamuju

1. Sejarah Singkat Kabupaten Mamuju

Kota Mamuju merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dan menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju yang diapit pantai dan perbukitan. Kota ini menjadi cermin kehidupan Kota Palu dan Kota Makassar karena letaknya yang berada di kedua kota tersebut dengan mayoritas penduduk Kota Mamuju adalah suku mandar dengan beberapa sub-suku diantaranya suku Bugis, Makassar, Toraja dan Jawa.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaungi 5 daerah tingkat II dengan wilayah berstatus Kabupaten. Dari 5 Kabupaten tersebut, didalamnya terdapat 66 wilayah kecamatan dan 602 desa/kelurahan pada tahun 2008. Kabupaten yang paling banyak kecamatan adalah Kabupaten Mamuju dengan 15 kecamatan, sedangkan Kabupaten yang mempunyai jumlah kecamatan paling sedikit adalah Kabupaten Majene yang hanya memiliki 8 kecamatan. Kabupaten Mamuju adalah ibu kota

Provinsi Sulawesi Barat. Diantara Kabupaten, yang paling jauh jaraknya dari Ibu Kota Provinsi adalah Kabupaten Mamuju Utara dengan jarak 276 Km dan yang terdekat adalah Kabupaten Majene dengan jarak 143 Km.

Bertolak dari semangat "Allamungan Batu di Luyo" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "Sipamandar" (saling memperkuat) untuk bekerja sama dalam membangun Mandar, dari semangat inilah maka sekitar tahun 1960 oleh tokoh masyarakat Manda yang ada di Makassar yaitu antara lain : H. A. Depu, Abd. Rahman Tamma, Kapten Amir, H.A. Malik, Baharuddin Lopa, SH. dan Abd. Rauf mencetuskan ide pendirian Provinsi Mandar bertempat di rumah Kapten Amir, dan setelah Sulawesi Tenggara memisahkan diri dari Provinsi Induk yang saat itu bernama Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulseltra).

Ide pembentukan Provinsi Mandar diubah menjadi rencana pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan ini tercetus di rumah H. A. Depu di Jl. Sawerigading No. 2 Makassar, kemudian sekitar tahun 1961 dideklarasikan di Bioskop Istana (Plaza) Jl. Sultan Hasanuddin Makassar dan perjuangan tetap dilanjutkan sampai pada masa Orde Baru perjuangan tetap berjalan namun selalu menemui jalan buntu yang akhirnya perjuangan ini seakan dipeti-es-kan sampai pada masa Reformasi barulah perjuangan ini kembali diupayakan oleh tokoh

masyarakat Mandar sebagai pelanjut perjuangan generasi lalu yang diantara pencetus awal hanya H. A. Malik yang masih hidup, namun juga telah wafat dalam perjalanan perjuangan dan pada tahun 2000 yang lalu dideklarasikan di Taman Makam Pahlawan Korban 40.000 jiwa di Galung Lombokkemudian dilanjutkan dengan Kongres I Sulawesi Barat yang pelaksanaannya diadakan di Majene dengan mendapat persetujuan dan dukungan dari Bupati dan Ketua DPRD Kab. Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polmas.

Tuntutan memisahkan diri dari Sulsel sebagaimana diatas sudah dimulai masyarakat di wilayah *Eks Afdeling* Mandar sejak sebelum Indonesia merdeka. Setelah era reformasi dan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 kemudian menggelorakan kembali perjuangan masyarakat di tiga kabupaten, yakni Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju untuk menjadi provinsi. Sejak tahun 2005, tiga kabupaten (Majene, Mamuju dan Polewali-Mamasa) resmi terpisah dari Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Propinsi Sulawesi Barat, dengan ibukota Propinsi di kota Mamuju. Selanjutnya, Kabupaten Polewali-Mamasa juga dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah (Kabupaten Polewali dan Kabupaten Mamasa). Untuk jangka waktu cukup lama, daerah ini sempat menjadi salah satu daerah yang paling terisolir atau yang terlupakan di Sulawesi Selatan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain, yang terpenting: Jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota

propinsi (Makassar); kondisi geografisnya yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang buruk.

Mayoritas penduduk (etnis Mandar, dan beberapa kelompok sub-etnik kecil lainnya) yang lebih egaliter, sehingga sering berbeda sikap dengan kelompok etnis mayoritas dan dominan (Bugis dan Makassar) yang lebih hierarkis (atau bahkan feodal) – pada awal tahun 1960an, sekelompok intelektual muda Mandar pimpinan almarhum Baharuddin Lopa (Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, 1999-2000, dan sempat menjadi ‘aikon nasional’ gerakan anti korupsi karena kejujurannya yang sangat terkenal) melayangkan ‘Risalah Demokrasi’ menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap beberapa kebijakan politik Jakarta dan Makassar; serta fakta sejarah daerah ini sempat menjadi pangkalan utama ‘tentara pembelot’ (Batalion 310 pimpinan Kolonel Andi Selle), pada tahun 1950-60an, yang kecewa terhadap beberapa kebijakan pemerintah dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI); selain sebagai daerah lintas-gunung dan hutan –untuk memperoleh pasokan senjata selundupan melalui Selat Makassar- oleh gerilyawan Darul Islam (DI) pimpinan Kahar Muzakkar yang berbasis utama di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Enrekang di sebelah timurnya. Pembentukan daerah kabupaten baru di wilayah sulawesi barat masih dalam proses dan dalam prosesnya masih sering diiringi oleh

permasalahan-permasalahan yang merupakan efek penyatuan pendapat yang belum memiliki titik temu.

Penduduk Sulawesi Barat berdasarkan hasil survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2006 berjumlah 992.656 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 356.391 jiwa mendiami Kabupaten Polewali Mandar. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Angkatan kerja, Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya. Penduduk usia kerja di daerah Sulawesi Barat pada tahun 2006 berjumlah 751.180 jiwa. Dari seluruh penduduk usia kerja yang masuk menjadi angkatan kerja berjumlah 444.324 jiwa atau lebih dari 50 persen dari seluruh Penduduk Usia Kerja. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 444.324 jiwa tercatat bahwa 53.215 orang dalam status mencari pekerjaan. dari angka tersebut dapat dihitung tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Barat pada tahun 2006, yakni sebesar 11,98 persen. angka ini merupakan rasio antara pencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja.

Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk Sulawesi Barat bekerja pada sektor pertanian yang berjumlah 276.299 orang atau 70,64 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang juga menyerap tenaga kerja cukup besar adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa. Potensi pariwisata cukup menjanjikan akan tetapi belum dikelola dengan baik secara optimal sehingga belum dapat hasil yang lebih nyata terhadap pemasukan devisa bagi daerah meski demikian, gunakan memperkenalkan pariwisata kepada masyarakat indonesia bahkan ke dunia internasional, pemerintah Sulbar menyiapkan berbagai upaya berupa promosi-promosi di media cetak maupun elektronik untuk memperkenalkan pariwisata ke dunia luar.

Objek Wisata Alam di Prov Sulbar antara lain :

1. Anjoro Pitu
2. Air panas
3. Sumur Jodoh di pulau karampuang

Objek wisata bahari antara lain :

1. Pasir Putih di Kab Polman
2. Air terjun Mata sapi di mamuju
3. Taman Laut Pulau Karampuang dan kepulauan bala-balakang
4. Permandian air panas di Kalumpang, tapandulu dan aralle di mamasa Tamasya Budaya
5. Rumah adat mamuju
6. Padi Tammanurung Kalumpang

7. Kayu Ebodi Raksasa di Kaluku

Potensi Agro wisata

1. Aneka ragam Flora Fauna

Potensi Tarian Daerah antara lain seperti rincian di bawah ini :

1. Tari Bamba Manurung
2. Tari Ma Bundu
3. Tari Motaro
4. Tari Bulu Londong
5. Tari Tuduq Mandar Pembolongatta
6. Tari Tuduq Kumba
7. Tari Dego Pallaga
8. Tari PaJinang
9. Kelapa Tujuh
10. Air Panas
11. Pulau Karampuang
12. Gantungan

2. Visi dan Misi Kabupaten Mamuju

VISI:

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Kabupaten Mamuju yang Maju dan Mandiri".

MISI:

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Masyarakat Sehat

- b. Pendidikan Murah dan Maju
 - c. Peningkatan Kualitas Iman
 - d. Kelestarian Budaya dan Pariwisata
2. Pembangunan Ekonomi (Ekonomi maju berbasis pertanian).
- a. Pembaruan Sistem pertanian tradisional.
 - b. Pengembangan komoditas unggulan dan ketersediaan pasar
 - c. Infrastruktur tertunjang
3. Pengembangan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
- a. Penguatan Pemerintahan Desa
 - b. Disiplin Aparat (Birokrasi)
 - c. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
 - d. Sistem Karir yang Sehat
4. Pemantapan Ibukota dan Penataan Wilayah
- a. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Jasa
 - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Kabupaten sebagai Pusat Rujukan antar Kabupaten di Wilayah Sulawesi Barat
 - d. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga
5. Kepastian Hukum dan Rasa Aman

a. Sertifikasi Massal Sistem

b. Optimalisasi Peran dan Fungsi TNI/POLRI serta Penegak

Hukum lainnya

3. Letak Geografis

Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 00 12'- 30 38'00'' Lintang Selatan/South Latitude dan 1180 43'15'' - 1190 54'3'' Bujur Timur/East Longitude, Provinsi Sulawesi Barat wilayahnya berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara/in the Northern side by : Sulawesi Tengah
2. Sebelah Timur/ in the Eastern side by : Sulawesi Selatan
3. Sebelah Barat/ in the Western side by : Selat Makassar
4. Sebelah Selatan/ in the Southern side by : Sulawesi Selatan

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 810,405 Km² yang meliputi 5 (lima) Kabupaten, dimana Kabupaten Polewali Mandar dengan luas wilayah 2,022 Km², Kabupaten Mamasa dengan luas wilayah 2,985 Km², Kabupaten Mamuju Utara dengan luas wilayah 3,044 Km², Kabupaten Majene 948 Km², dan Kabupaten Mamuju 8,222 Km². Kabupaten Mamuju adalah kabupaten terluas. Luas kabupaten tersebut 48% dari seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sementara kabupaten Majene adalah Kabupaten terkecil dengan luas wilayah 948 Km² Faktor yang paling berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan adalah masih banyaknya daerah yang sulit dijangkau yang disebabkan oleh medan yang berat karena melalui sungai, pulau terpencil yang harus ditempuh 2-3 hari

dan ada juga daerah pegunungan yang harus dilewati dengan kuda. Disamping itu masih ada sekelompok masyarakat yang sukar berinteraksi dengan dunia luar dan menutup diri dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan termasuk intervensi pelayanan kesehatan ke daerah mereka seperti pelayanan imunisasi, pentingnya hidup bersih dan sehat, pemeriksaan ibu hamil, bayi dan balita dan pelayanan kesehatan lainnya.

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas dataran tinggi dan rendah. Di Sulawesi Barat terdapat 193 buah gunung dan yang tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut. Gunung ini berdiri tegak di Kabupaten Mamuju. Umumnya ditiap Kabupaten memiliki beberapa perbukitan dan pegunungan yang berpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, juga memiliki garis pantai yang merupakan daerah dataran rendah yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan darat dan laut seperti di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Jumlah sungai yang mengalir di Wilayah Sulawesi Barat tercatat sekitar 8 aliran sungai, dengan jumlah aliran yang terbesar di Kabupaten polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada dua yaitu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan polewali Mandar serta Sungai Karama di Kabupaten Mamuju. Panjang kedua sungai tersebut masing-masing 150 km.

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2008 suhu udara maksimum terjadi di Stasiun Meteorologi Kabupaten Majene, yaitu sebesar 34,2°C, sedangkan suhu udara minimum yaitu sebesar 22,4°C. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelembaban udara relative tinggi, dimana pada tahun 2008 rata-rata berkisar antara 76,5 persen sampai 82,8 persen. Sedangkan kecepatan angin hampir diseluruh wilayah kabupaten di Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu berkisar 5 km/jam hingga 14 km/jam. Data suhu minimum dan maksimum serta posisi Stasiun Pengamatan, arah dan kecepatan angin serta kelembaban udara. Dengan Kelembaban udara yang relative tinggi dan adanya 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau menjadikan daerah ini masih sering terjadi penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TBC, ISPA, diare dan penyakit lainnya.

4. Keadaan Demografis

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian migrasi serta penuaan. Tabel ini kami sajikan secara umum data masyarakat Mamuju setiap Kecamatan, Luas Wilayah, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk sebagai berikut :

Tabel Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Wilayah, dan Penduduk Tahun 2017

No.	Nama Kecamatan	Luas	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Tapalang	504,11	16,143	32,02
2.	Tapalang Barat	127,14	7,656	60,22
3.	Mamuju	160,24	42,714	266,57
4.	Simboro	91,69	19,715	215,02
5.	Balabalakang	9,00	1,995	221,66
6.	Kalukku	461,99	45,179	97,79
7.	Papalang	160,43	21,765	135,66
8.	Sampaga	95,64	14,528	151,43
9.	Tommo	588,28	18,583	31,59
10.	Kalumpang	1,778,21	13,960	7,85
11.	Bonehau	950,76	9,550	10,04
12.	Budong-Budong	1,140,43	21,499	18,85
13.	Pangale	232,52	13,867	59,64
14.	Topoyyo	543,88	24,239	44,57
15.	Karossa	1,069,31	21,628	20,23
16.	Tobadak	100,13	22,032	220,03
Jumlah		8,014,06	315,053	39,31

5. Arah Kebijakan

1. peningkatan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang yang mampu mendukung kemajuan ekonomi.
2. Peningkatan pembangunan ekonomi
3. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
4. Pengembangan tata kelola pemerintahan, dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan.
5. Peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.

B. Profil Yayasan Karampuang Mamuju

Yayasan Karampuang Mamuju pada mulanya adalah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan wadah penyaluran aspirasi dalam memenuhi tuntutan pembangunan disegala bidang untuk kepentingan bersama di Provinsi Sulawesi Barat. Yayasan Karampuang Mamuju didirikan pada tanggal 12 Juni 2005, yang terdiri dari pemuda-pemuda dari berbagai disiplin ilmu. Yang diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat dan berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan. Yayasan Karampuang Mamuju dituntut agar tetap eksis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan senantiasa mengedepankan semangat partisipatif, keadilan dan kesejahteraan disertai transparansi dalam pengelolaannya. Yayasan Karampuang Mamuju juga diharapkan dapat membimbing masyarakat dalam proses perubahan pola pikir dan sikap menuju kemandirian sehingga dapat membangun diri, keluarga dan lingkungannya dalam mekanisme manajerial. Dalam proses Pelaksanaannya melibatkan komponen masyarakat sebagai

elemen terbesar dalam membangun daerah, juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan di lingkungannya.

Menyikapi tuntutan kebutuhan tersebut diatas, maka Pada Tahun 2015, dengan maksud lebih memperkuat legalitas lembaga, Yayasan Karampuang Mamuju secara resmi menjadi Yayasan dibawah payung hukum Republik Indonesia. sebagai wadah berhimpun dan penyaluran aspirasi yang berorientasi pada penguatan kelembagaan masyarakat sebagai komponen pembaharuan ditengah pluralitas. Yayasan Karampuang Mamuju juga memiliki SOP (*standard operating procedure*) yang merupakan prosedur standar untuk kelembagaan disekretariat yayasan karampuang mamuju. SOP ini dibuat dalam bentuk narasi prosedur kegiatan operasional.

SOP ini dirancang sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik yayasan karampuang mamuju sebagai organisasi yang dapat membimbing masyarakat dalam proses perubahan pola pikir dan sikap menuju kemandirian sehingga dapat membangun diri, keluarga dan lingkungan. SOP ini akan berjalan dengan baik, jika pihak-pihak yang terlibat di dalam seluruh sistem ini akan mendukung serta melaksanakan prosedur yang telah disepakati bersama. Tanpa dukungan semua pihak, maka sistem ini tidak akan berfungsi maksimal di dalam mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Yayasan Karampuang Mamuju.

Tujuan SOP Yayasan Karampuang Mamuju terdapat suatu referensi baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja para pengurus, sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten untuk

menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang ditetapkan serta terdapat tolak ukur yang jelas untuk menilai kinerja para pengurus dan mengurangi waktu orientasi bagi para pengurus karena mereka dapat belajar sendiri dari pedoman ini serta memudahkan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan atau orientasi dari organisasi Yayasan Karampuang Mamuju dimasa yang akan datang. Adapun divisi hukum Yayasan Karampuang Mamuju sebagai berikut:

1. Membuat perancangan program kerja setiap enam bulan dan setahun.
2. Melaporkan kegiatan pertriwulan.
3. Setiap kebutuhan untuk pelaksanaan program harus cepat dilaporkan kepada direktur sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
4. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum terhadap tata kelola lembaga.
5. Merencanakan program pertriwulan, 6 bulan, 1 tahun dan 3 tahunan.
6. Melaporkan progres kegiatan dan keuangan terhadap program yang dijalankan.
7. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program yang dijalankan.
8. Melakukan pendokumentasian kegiatan bekerjasama dengan divisi dokumentasi.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Yayasan Karampuang adalah “masyarakat sejahtera dan berdaya dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan kemandirian lokal menuju masyarakat adil dan makmur”.

b. Misi

Misi Yayasan Karampuang adalah:

1. Masyarakat wajib menjadikan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber kearifan dalam peningkatan kualitas dan tatanan kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
3. Mewujudkan demokratisasi akses masyarakat dalam mengembangkan SDM bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan memperkuat kearifan sosial budaya dan ekonomi pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan aktifitas ilmiah yang dapat menunjang peningkatan kualitas SDM.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap hakikat ilmu hukum dan pendampingan masyarakat.
6. Memberdayakan potensi masyarakat dalam rangka pemberdayaan sumber daya alam yang berbasis ramah lingkungan.

7. Mengupayakan terbukanya peluang kerja yang luas melalui usaha-usaha produktif yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dibangun atas pertimbangan keadilan, transparansi dan profesionalisme.

2. Peran dan Tugas Pengurus Yayasan Karampuang

a. Peran, Tugas Pokok Direktur Eksekutif

1. Peran direktur eksekutif

- Peran strategis, yaitu peran untuk memberikan pengaruh positif pada status dan performa lembaga.
- Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan kinerja staf melalui pembuatan sistem dan prosedur yang cocok dengan karakteristik lembaga.
- Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan manfaat positif kepada staf lembaga melalui pendistribusian informasi.

2. Tugas Pokok Direktur Eksekutif

- Mengelola dan mengatur pelaksanaan kegiatan lembaga dengan selalu memperhatikan kesejahteraan pengurus.
- Mempunyai loyalitas, kedermawanan, berpikiran maju demi kelangsungan yayasan.
- Mempunyai sifat amanah dan jujur sehingga tidak terjadi penyelewangan kepentingan yang merugikan yayasan.
- Memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan berdasarkan asas manfaat.

- Menciptakan relasi kerja sama baik eksternal maupun internal.

b. Tugas Pokok Program Officer

1. Melakukan koordinasi langsung dengan direktur eksekutif.
2. Melakukan koordinasi dengan keuangan dan administrasi
3. Mengkoordinir divisi-divisi dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua pelaksanaan program.
4. Melakukan kinerja monitoring dan evaluasi terhadap kinerja setiap divisi bersama direktur.

c. Tugas Pokok Keuangan dan Administrasi

1. Perbendaharaan dan Laporan

- Bersama direktur eksekutif membuat rencana kegiatan.
- Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional kelembagaan.
- Membuat laporan keuangan kelembagaan dan keuangan program yang bersumber dari divisi masing-masing dan dari lembaga donor.
- Mengadministrasikan seluruh dokumen keuangan.
- Membuat anggaran dan program terhadap lembaga donatur bersama direktur beserta divisi yang bersangkutan.
- Menyusun laporan keuangan untuk pembayaran pajak program (bersama divisi yang terkait) dan tahunan.
- Memeberikan informasi dan laporan tertulis kepada direktur eksekutif terkait perkembangan dan posisi keuangan lembaga.

- Memberikan pelatihan mengenai pembukuan keuangan bekerja sama dengan divisi pendidikan penelitian dan pengembangan organisasi.
- Menyiapkan buku rekening dan rekening Giro yang disetujui oleh direktur Eksekutif.
- Meminta kepada pihak bank rekening koran secara berkala.
- Setiap pengeluaran mengetahui direktur dan pembelajaran harus disertai bukti kwitansi atau bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Penerimaan keuangan dimasukkan ke file komputer dan pembukuan.
- Berhak memasukkan atau mengeluarkan uang dari Bank dengan disetujui oleh direktur.
- Menjaga seluruh dokumen keuangan secara rahasia.

2. Inventaris Penggunaan Aset

- Melakukan pendataan aset yayasan secara berkala.
- Membuat pembukuan penggunaan aset.
- Membuat pengajuan pengadaan aset jika dianggap perlu.
- Membuat buku pencatatan mengenai peminjaman aset terhadap pihak lain.

3. Administrasi Persuratan

- Membuat pencatatan surat keluar dan masuk.
- Membuat surat izin tugas atau rekomendasi kerja.

- Merapikan berkas, arsip dan dokumen yayasan sehingga mudah diakses baik oleh pengurus sendiri atau pihak lain yang telah diizinkan oleh Direktur.

3. Data Penduduk Yayasan Karampuang Mamuju yang di Berdayakan

Jumlah Data Penduduk Yang Diberdayakan

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Simboro	11,819	11,381
2.	Kalukku	25,169	24,081
3.	Sampaga	7,132	6,854
Jumlah		44,120	42,316

C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju

Pemberdayaan masyarakat adalah Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Proses pemberdayaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang

dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun fokus peneliti yang dijadikan acuan-acuan dalam indikator-indikator proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Pemberian kewenangan, (2) Pengembangan kapasitas. Adapun masing-masing distribusi jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberian Kewenangan

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di yayasannya mamuju dalam pemberian kewenangan artinya setiap program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mamuju memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengeluarkan pendapatnya akan tetapi Pemerintah Daerah Mamuju juga menerapkan aturan program kerja yang mereka jalankan sehingga tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku.

Salah satu contoh pemberian kewenangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Mamuju kepada masyarakat dalam program kerja yaitu SIOLA (pelayanan terpadu pengembangan anak usia dini di Kabupaten Mamuju). SIOLA dilaksanakan secara holistik integratif, dan partisipatif dengan memperluas kesempatan bagi setiap anak untuk memperoleh dan menikmati pendidikan usia dini. Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong dan mendukung pembinaan anak usia dini dalam bentuk program dan kegiatan, serta mendorong keterlibatan keluarga untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengasuhan,

perlindungan, dan perkembangan anak. Adapun partisipasi masyarakat dalam program SIOLA sangat mendukung karena dimana program SIOLA dapat menumbuh kembangkan wawasan berfikir anak dan menumbuhkan rasa percaya diri sejak dini sebelum memasuki bangku sekolah dasar.

Berikut adalah wawancara peneliti dengan Sekertaris Pemerintah Daerah :

“Dipihak kami selaku pemerintah hanya berharap program SIOLA ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan karena program SIOLA ini sangat penting bagi anak-anak usia dini untuk menumbuh kembangkan pengetahuan sebelum memasuki sekolah dasar. Kami memberikan kewenangan kepada pihak keluarga karena keluarga memiliki peran penting yang dapat membantu dan membina agar anak-anak dapat memiliki sedikit pengetahuan misalnya anak-anak sudah pintar menulis dan membaca”.

(Hasil Wawancara HS, Rabu 26 Desember 2018)

Menganalisis Hasil Wawancara oleh sekertaris pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat dalam program SIOLA dimana Pemerintah juga sangat memperhatikan penggunaan nilai-nilai lokal dan modal sosial melalui penemuan kembali dan penggunaan permainan, dongeng, dan lagu – lagu tradisional sebagai alat bantu mengajar sehingga anak-anak dapat menambah wawasan sebelum memasuki sekolah dasar.

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua Yayasan Karampuag Mamuju :

“Tentunya dalam pemberian kewenangan kepada masyarakat kami mensosialisasikan kegiatan yang kami lakukan setelah

itu masyarakat mampu berproses tanpa didampingi oleh pihak yayasan karampuang. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan Yayasan Karampuang yaitu membuat pelatihan seperti training of trainert seperti dalam program pencegahan pernikahan anak usia dini”.

(Hasil Wawancara IS, Senin 3 September 2018).

Menganalisis hasil wawancara oleh ketua yayasan karampuang mamuju dalam proses pemberdayaan sosial masyarakat di kabupaten mamuju salah satunya pemberian kewenangan yaitu dimana yayasan karampuang memberikan sepenuhnya kewenangan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh yayasan karampuang dan masyarakat juga bebas untuk mengeluarkan pendapat.

Hasil wawancara penenliti dengan staf yayasan karampuang mamuju mengatakan bahwa :

“Dalam pemberian kewenangan kami hanya mendorong masyarakat agar mereka tahu dan paham mengenai setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Contoh salah satu kegiatan yang dilakukan seperti dana desa itu digunakan tidak hanya untuk pembangunan sekolah tapi untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan untuk bumdes tapi kadang masyarakat tidak mau tahu tentang itu jadi kami mendorong pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka paham terkait dana desa”.

(Hasil Wawancara AM, Senin 3 September 2018).

Tergambar dari hasil wawancara kedua dengan staf Yayasan Karampuang mamuju bahwa dalam pemberian kewenangan di Yayasan Karampuang memiliki banyak kegiatan salah satunya yaitu

kegiatan pembangunan sekolah dimana kegiatan pembangunan ini dilakukan untuk menambah atau dapat meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat Yayasan Karampuang Mamuju.

Hasil wawancara lainnya dengan staf Yayasan Karampuang mamuju mengatakan bahwa :

“Tergantung dari program kerjanya, dapat kita lihat dari kegiatan yang dilakukan di pulau karampuang kami memberikan kewenangan berupa peralatan kepada masyarakat contohnya itu seperti pembuatan kripik singkong kami memberikan peralatan kepada tiap-tiap kelompok, pembuatan ice cream kami memberikan kulkas, mixer untuk membuat ice cream, dan ayam beserta alat penetasnya dan pakan ayam”.

(Hasil Wawancara PB, Senin 3 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan staf yayasan karampuang bahwa pemberian kewenangan tidak hanya memberikan masyarakat kewenangan untuk berpendapat atau ikut serta berpartisipasi akan tetapi yayasan karampuang juga memberikan sebuah bantuan non-materil kepada masyarakat agar kiranya masyarakat mampu diberdayakan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masyarakat.

Hasil wawancara selanjutnya peneliti dengan staf yayasan karampuang mamuju yang mengatakan bahwa :

“Kami tidak pernah membatasi kewenangan dalam hal pemberdayaan contohnya seperti yayasan karampuang bekerja untuk program SIOLA kami butuh tenaga misalnya sekian fasilitator kami umumkan secara terbuka di facebook serta di website bahwa kami membutuhkan fasilitator tentunya kami lebih mengutamakan teman-teman puta putri

mamuju untuk bekerja dengan kami ketimbang orang dari luar dulu selama mereka memenuhi kualifikasi, dan kami menerapkan aturan dalam setiap program yang kami jalankan sehingga tidak keluar dari norma-norma yang ada, kami juga tidak ingin melampaui kewenangan pemerintah jadi setiap program kami pemerintah turut mengambil bagian agar kegiatan yang kami lakukan terus berjalan karena kami tidak ingin setelah program selesai maka selesai juga makanya kami melibatkan pemerintah agar mereka mengambil alih untuk membina masyarakat agar program tetap berjalan”.

(Hasil Wawancara MA, Senin 3 September 2018).

Deskripsi Hasil wawancara dengan beberapa staf yayasan karampuang diatas yang mengatakan bahwa dalam pemberian kewenangan yaitu masyarakat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat mengenai salah satu program kerja Yayasan Karampuang seperti program kerja SIOLA (pelayanan terpadu pengembangan anak usia dini holistik integratif di kabupaten mamuju) untuk melakukan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu, pemberian kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang dan tidak terlepas dari kewenangan pemerintah atau aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan agar setiap program yang ingin di jalankan dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif sesuai aturannya.

Hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Kewenangan pengelolaan pembangunan dari yayasan karampuang karena yayasan karampuang bukan sumber pendana dan itu bermitra dengan pemerintah mereka mensosialisasikan bersama dengan pemerintah untuk kegiatan pembangunan sekolah yang ada di desa, tidak hanya

memberikan motivasi memberikan langkah-langkah sesuai dengan protok yang ada di pemberdayaan itu sendiri utamanya itu dipartisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dan itu dibantu oleh yayasan karampuang”.

(Hasil Wawancara dengan MM, Selasa 28 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat bahwa pemberian kewenangan Yayasan Karampuang tidak berjalan sendiri untuk dapat memberdayakan masyarakat tetapi Yayasan Karampuang mengikut sertakan pemerintah di dalamnya (Bermitra), dalam hal proses penggalangan dana Yayasan Karampuang menerima CSR dari setiap perusahaan yang ikut bermitra salah satunya UNICEF. Yayasan Karampuang juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Hasil wawancara selanjutnya dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Kalau yang ini mungkin saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena ini mungkin sebaiknya dijawab oleh yayasan karampuang itu sendiri di dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat bagaimana sistem atau metode yang dilakukan apakah dia hanya sekedar melibatkan masyarakat atau memang ada pelimpahan kewenangan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan kegiatan ini yang belum saya ketahui tetapi yang pasti disatu sisi kegiatan yang saya sampaikan tentang pernikahan anak usia dini saya melihat yang memfasilitasi kegiatan tersebut memang dilakukan sendiri oleh yayasan karampuang lalu melibatkan semua unsur yang ada jadi tetap mendapat dukungan dari pemerintah”.

(Hasil Wawancara dengan KH, Rabu 29 Agustus 2018).

Hasil wawancara diatas dengan beberapa informan dapat kita simpulkan bahwa setiap pemberian kewenangan dalam hal pemberdayaan masyarakat yayasan karampuang mamuju melibatkan banyak unsur dalam setiap kegiatannya salah satunya bermitra dengan pemerintah itu sendiri, dimana pemerintah ikut serta membantu yayasan karampuang untuk mensosialisasikan setiap program kegiatan yang ingin dilaksanakan kepada masyarakat. Akan tetapi setiap kegiatan yang dilakukan oleh yayasan karampuang tetap berada pada norma-norma yang ada.

Pemberian Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Pemberian kewenangan merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Pemberian kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang.

2. Pengembangan Kapasitas

Proses pengembangan kapasitas Yayasan Karampuang terhadap masyarakat diharapkan semakin memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ketergantungan pada satu sisi saja. Dengan demikian proses ini membutuhkan peran dari luar sebagai perubahan lingkungan untuk menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat.

Pengembangan kapasitas merupakan kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. Pengembangan

Kapasitas khususnya program SIOLA juga merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat khususnya bagi anak usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Daerah Mamuju mengatakan bahwa :

“Kita berharap dalam pengembangan kapasitas ini baik setiap individu maupun kelompok mampu mengembangkan kemandirian dan kemampuan berpikir tentang apa yang ada dilingkungan sekitar. Pengembangan kapasitas juga tidak bisa berkembang tanpa ada dorongan dari luar. Pengembangan kapasitas ini bukan hanya berbicara tentang keterampilan dan kemampuan individu atau kelompok tapi juga kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif.”

(Hasil Wawancara HS, Rabu 26 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Sekertaris Daerah Mamuju: Pengembangan kapasitas sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu dan kapasitas sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang, organisasi, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, serta menetapkan dan mencapai tujuan. Pengembangan kapasitas harus berorientasi pada hasil.

Hasil Wawancara peneliti dengan Ketua Yayasan Karampuang Mamuju mengatakan bahwa :

“Yayasan karampuang selalu membuat pelatihan seperti *training of trainert* seperti dalam program pencegahan pernikahan anak usia dini ini ada yang berbasis masyarakat jadi ada juga yang kami latih fasilitator desa kemudian di level kecamatan kita juga latih kalau di program pendidikan ada perencanaan pendidikan berbasis desa

dilatih juga aparat desanya untuk bagaimana mereka menyusun program kerja”.

(Hasil Wawancara dengan IS, Senin 3 September 2018).

Menganalisis hasil wawancara oleh Ketua Yayasan Karampuang dalam upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan diberbagai tingkatan yang mencakup berbagai macam aspek, mulai dari sumberdaya manusianya maupun juga sitem-sistem yang mengatur proses kerja didalamnya.

Hasil wawancara peneliti dengan staf yayasan karampuang mamuju mengatakan bahwa :

“Seperti yang saya katakan di kegiatan yang ada di pulau karampuang pengembangan kapasitasnya itu hanya melatih keterampilan masyarakat agar ada hal baru yang mereka ketahui untuk meningkatkan perekonomian masyarakat”.

(Hasil Wawancara dengan PB, Senin 3 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Yayasan Karampuang mamuju dalam hal pengembangan kapasitas yayasan karampuang memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia. Yayasan karampuang untuk Pengembangan kapasitas tentu agar setiap individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan dari individu maupun organisasi masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan staf yayasan karampuang mamuju yang mengatakan bahwa :

“Ya justru kami ini semacam bagaimana masyarakat yang lebih bersuara jadi disetiap program kami misalnya seperti penyediaan data itu masyarakat kami latih, masyarakat yang pergi mendata, masyarakat yang mengecek juga datanya sudah valid atau tidak, begitupun SIOLA guru-gurunya kami latih, baik orang tuanya kita latih mengelolah dana koperasi dan sebagainya, misalnya di gerakan kembali bersekolah juga begitu dan terakhir itu misalnya program desa tuntas wajar 9 tahun kami melatih kepala desa, perangkat desa, BPD desa untuk bagaimana menyusun APBD desa agar lebih berpihak ke masyarakat lokal”.

(Hasil Wawancara dengan MA, 3 September 2018).

Hasil wawancara peneliti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengembangan kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat selama bekerja sama dengan Yayasan Karampuang sudah bagus karena mereka sudah mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat dan membina masyarakat sampai mahir dalam keterampilan”.

(Hasil Wawancara dengan MM, Selasa 28 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara diatas dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat bahwa pengembangan kapasitas terhadap masyarakat adalah suatu pembelajaran yang berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidak tahuan, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.

Menurut hasil wawancara di atas dengan Staf Yayasan Karampuang Mamuju bahwa setiap pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat yayasan karampuang seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat misalnya pelatihan di tingkat kecamatan maupun sampai ditingkat desa agar masyarakat

mampu mengembangkan kemampuan yang dia miliki dan mampu meningkatkan perekonomiannya masing-masing.

Hasil wawancara selanjutnya dengan masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Yayasan karampuang memberikan pendampingan kepada masyarakat misalnya kalau ada kasus-kasus tertentu yang terjadi mereka biasa memeberikan pendampingan juga sebagai berperan sebagai edukasi memberikan pencerahan kepada masyarakat menyampaikan berbagai macam program disampaikan kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat ini bisa mendapatkan informasi-informasi yang ada bisa sampai ke masyarakat sehingga berpeluang juga untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat berkaitan dengan masalah ekonomi pengembangan usaha berkaitan juga dengan kesehatan dan sebagainya”.

(Hasil wawancara dengan NA, Rabu 29 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dengan masyarakat dalam upaya pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh yayasan karampuang mamuju yaitu memberikan pelatihan atau arahan-arahan kepada masyarakat dengan berbagai macam program kegiatan agar masyarakat mampu mengembangkan sendiri potensi yang dimiliki dan mampu membuka peluang untuk menambah perekonomiannya.

Hasil wawancara lainnya dengan Masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Yang saya lihat yayasan karampuang melakukan pengembangan kapasitas masyarakat itu sebenarnya selain memang melakukan sosialisasi kepada masyarakat saya melihat juga bahwa mereka ini tidak terlepas fungsinya sebagai fasilitator karena dia juga memfasilitasi bagaimana masyarakat itu bisa mandiri contohnya

dalam hal pernikahan anak usia dini yayasan sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana upaya-upaya pencegahan pernikahan anak usia dini agar tidak banyak lagi anak-anak yang menikah diusia dini”.

(Hasil Wawancara dengan KH, Rabu 29 Agustus 2018).

Menurut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat mengenai pengembangan kapasitas yang dilakukan yayasan karampuang terhadap masyarakat dapat dikatakan sangat membantu dikarenakan yayasan karampuang sering memberikan sosialisasi atau arahan-arahan kepada masyarakat mengenai pernikahan anak usia dini. Yayasan karampuang pun tidak hanya memberikan arahan melainkan memberikan pencegahan agar kiranya pernikahan usia dini tidak lagi berkembang di kalangan remaja mengingat yayasan karampuang berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan Masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Yayasan karampuang dalam pengembangan kapasitas dia membentuk kelompok remaja dan memberikan sosialisasi semacam bintek terhadap remaja dan keluarga”.

(Hasil Wawancara dengan SB, Rabu 29 Agustus 2018).

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat memang sangat membutuhkan arahan dari yayasan karampuang selaku fasilitator bagi masyarakat agar kiranya setiap program kerja kegiatan yang ada di yayasan karampuang misalnya pencegahan pernikahan anak usia dini dan pengembangan kapasitas

masyarakat baik dari segi potensi keterampilan maupun dari segi ekonomi masyarakat dapat terwujud dan efektif.

Meningkatkan pengembangan kapasitas merupakan sebuah pendekatan yang pada masa sekarang ini digunakan dalam pembangunan masyarakat dan sebagai kemampuan umum untuk melaksanakan sesuatu agar memperbaiki kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Proses Kemitraan Yayasan Karampuang dengan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Mamuju yaitu :

1. dari segi pemberian kewenangan, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi dan bebas untuk menyalurkan pendapat.
2. dalam segi pengembangan kapasitas, Yayasan Karampuang dan Pemerintah Daerah memberikan arahan atau sosialisasi tentang upaya pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat agar kiranya dapat menambah potensi masyarakat dalam segi keterampilan dan dapat menambah pengetahuan individu maupun kelompok.

B. Saran

Khususnya untuk Pemerintah Daerah dan Yayasan Karampuang Mamuju agar kiranya tetap menjaga eksistensi dan tetap menjaga program-program kerja atau kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik, dan dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- _____. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arianto, Jumili. 2017. *NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia*. Jurnal PPKn & Hukum. Vol. 12 No. 2 Oktober 2017.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Aziz Muslim. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Teras. Yogyakarta.
- Dani Husodo Bonifatius. 2015. *Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan*.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rinika Cipta. Jakarta.
- Henryk, Stepanus. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Journal Ilmu Pemerintahan. 1 (2): 612 - 625 ISSN 0000-0000.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press.
- Kadarisman. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Raja Gafindo Persada. Jakarta.
- Khairul Muluk, 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Bayumedia.

LAKSMI.INDONESIA/posts/222356447837950, diakses tanggal 9 Maret 2015, Jam 10.10

Mahardika, Friska. 2012. *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Purwokerto.

Mappaming. 2011. *Partisipatif Manajemen Pengelolaan*. Makassar. YAPMA Makassar.

Mardikanto, Totok dk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.

Pettonk, Arhy. 2018. *Sejarah YKM*. Di akses pada 16 Maret 2018 http://yayasankarampuang.or.id/hasil_tentang/sejarah.php?tentang=sejarah.

Radu, La. 2015. *Inovasi Pengelolaan Terumbu Karang (Study Kasus Tentang Coral Governance) di Kabupaten Wakatobi*. Skripsi Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rahayu, Budiana. 2008. *Pembangunan Perekonomian Nasional melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, MG, Semarang.

Sedermayanti. 2012. *Good Governance*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Setiadi , M. Elly dan Kolip, Usman, 2013. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, teori dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media. Jakarta.

Setiawan, Ari. 2015. Skripsi: *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Objek Wisata Pantai Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba*. Administrasi Negara. Makassar.

Soemantri, Bambang Trisantoso. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.

Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peran Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Sukmawati. 2012. *Skripsi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3a) dalam Peningkatan Hasil Produksi Pertanian di Kelurahan Tonyamang Kabupaten Pinrang*. STIA LAN Makassar.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Di akses pada 16 April 2018 http://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2015/08/UU_NO_17_2013.pdf
- Wahjudin,Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Reinforcement Action and Development*. Banda Aceh.
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2011. *Otonomi Daeran dan Daerah Otonom*. P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yusdiyanto. 2012. *Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ar Ruzz Media. Jakarta.
- Zuhro R. Siti, dkk. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAN
DOKUMENTASI
PENELITIAN

LAMPIRAN
DOKUMENTASI

1. Foto Bersama Sekretaris Pemerintah Daerah Mamuju



2. Foto Bersama Ketua Yayasan Karampuang Mamuju



3. Foto Bersama Staf Yayasan Karampuang Mamuju



4. Foto Bersama Staf Yayasan Karampuang Mamuju



5. Foto Bersama Staf Yayasan Karampuang Mamuju



6. Foto bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat



7. Foto Bersama Tokoh Masyarakat



8. Foto Bersama Tokoh Masyarakat



9. Foto bersama Tokoh Masyarakat



10. Foto bersama Tokoh Masyarakat

